

# Secercah Pengantar dan Refleksi Aksesi Indonesia ke OECD



## **Penulis**

Dinda Rahmania

## **Kurator dan Editor**

Abul Muamar

Angelika Fortuna Dewi Rusdy

Bona Tua Parlinggomon Parhusip

Marlis Afridah

## **Desain Visual dan Tata Letak**

Irhan Prabasukma


Marlis Afridah

## **Kredit Kumpulan Foto**

Unsplash

## **Diterbitkan Oleh INFID, Juli 2024**



 Jl. Jati Padang Raya Kav. 3 No. 105, Sunday Market,  
South Jakarta, 12540

 infid@gmail.com

 <https://infid.org/>

## **Dalam Kemitraan Bersama**



 [partnership@greennetwork.asia](mailto:partnership@greennetwork.asia)

 <https://greennetwork.asia/> | <https://greennetwork.id/>

# Daftar Isi

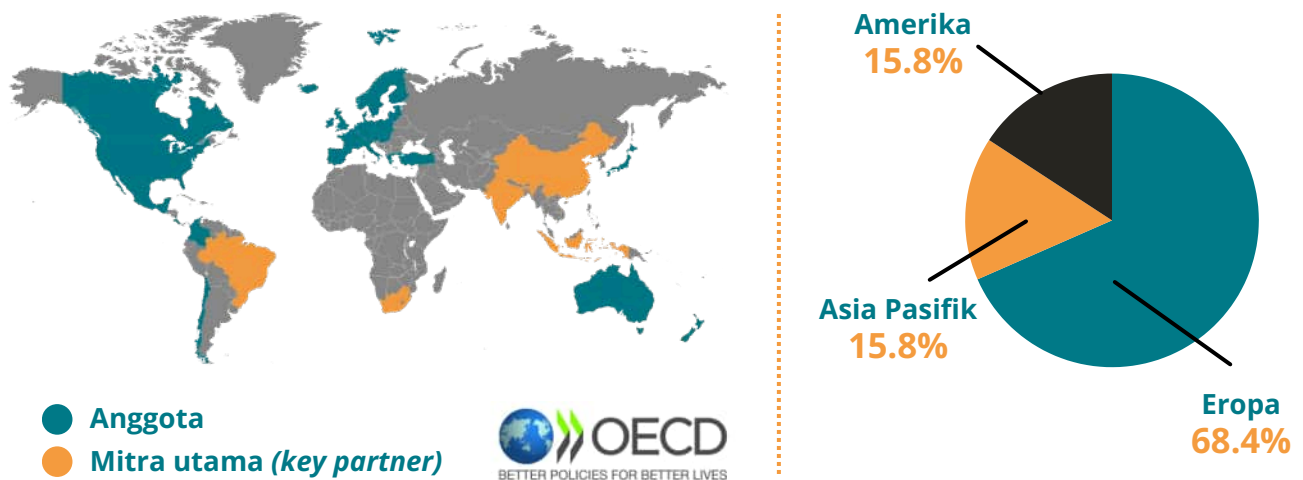
<b>Apa itu OECD?</b>	<b>1</b>
<b>Memahami Standar dan Kepatuhan OECD</b>	<b>2</b>
<b>Posisi Indonesia dalam Sistem Internasional</b>	<b>3</b>
<b>Hubungan Indonesia dan OECD</b>	<b>4</b>
<b>Akses Indonesia ke OECD</b>	<b>6</b>
<b>Peluang Indonesia dalam OECD</b>	<b>7</b>
<b>Refleksi Singkat Kami: Kekhawatiran dan Tantangan dalam Akses</b>	<b>9</b>

# Apa itu OECD?

OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*), atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi, adalah forum dimana pemerintah dari 38 negara bekerja sama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, serta pembangunan yang berkelanjutan. Negara-negara dapat saling berbagi pengalaman dan mencari solusi untuk masalah bersama. Selain itu, OECD juga menyediakan data analisis mengenai perdagangan dan investasi global untuk bisa memprediksi tren ekonomi masa depan.

Negara anggota OECD mewakili lebih dari 40 persen dari PDB global, menggunakan setengah dari konsumsi energi dunia, dan mengontrol 80 persen aktivitas perdagangan dunia. OECD memiliki 38 negara anggota. Negara-negara maju dari Eropa, Amerika Utara, dan Asia Pasifik mendominasi keanggotaan OECD, sedangkan jumlah negara berkembang hanya satu, yaitu Kolombia di Amerika Selatan. Selain itu, negara anggota OECD merupakan pusat sentral ekonomi pembangunan global. Misalnya, markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berada di New York, kantor pusat Bank Dunia serta Dana Moneter Internasional (IMF) juga berada di Amerika Serikat dan Eropa, bahkan kantor pusat OECD pun terletak di Paris, Prancis. Hal tersebut menunjukkan pentingnya peran negara-negara OECD dalam ekonomi global.

Selain dengan negara-negara anggota, OECD juga menjalin kerja sama dengan lebih dari 70 negara lain di dunia, di antaranya termasuk lima mitra utama (*key partner*) yaitu Indonesia, Tiongkok, Brazil, India, dan Afrika Selatan.



Grafik: Peta dunia dengan anggota & mitra utama (*key partner*) OECD

# Memahami Standar dan Kepatuhan OECD

OECD menetapkan standar dan kepatuhan dengan kesepakatan bersama antar negara anggota tentang norma atau kebijakan yang harus diikuti. Istilah "standar" di sini mencakup semua peraturan hukum, prinsip, dan panduan kebijakan yang dibuat. Aturan hukum OECD di antaranya termasuk keputusan, rekomendasi, dan perjanjian internasional yang mencakup sektor ekonomi dan pembangunan, kesehatan, pendidikan, pajak, dan sebagainya. Rekomendasi OECD juga sering dijadikan rujukan oleh lembaga-lembaga pembangunan global dalam perancangan keputusan.

Penetapan standar bertujuan untuk memastikan persaingan yang adil, baik antar negara maupun perusahaan swasta. Selain itu, standarisasi juga bertujuan untuk mempermudah aliran modal, layanan, dan informasi antar negara. Dengan begitu, aturan OECD diharapkan dapat memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat melalui kebijakan internasional yang diterapkan di dalam negeri.

Untuk menjadi anggota, suatu negara harus menyesuaikan kebijakan, hukum, dan regulasi dalam negeri dengan standar yang ditetapkan OECD, seperti aturan pajak, investasi, pertanian, dan perlindungan lingkungan. Artinya, untuk bisa menjadi anggota tetap OECD, negara perlu menyesuaikan kebijakan dalam negeri dengan sekitar 270 instrumen hukum yang telah ditetapkan oleh OECD. Proses ini melibatkan reformasi di beberapa sektor untuk memenuhi standar tersebut.



Grafik: Tujuan Utama Standar OECD | Sumber: Halaman OECD Legal Instruments

# Posisi Indonesia dalam Sistem Internasional

Indonesia memiliki kekuatan ekonomi terbesar ke-10 berdasarkan daya beli dan memiliki populasi terbesar ke-4 di dunia. Menurut laporan Bank Dunia, ekonomi Indonesia cenderung stabil dan menunjukkan tingkat ketahanan yang relatif cukup baik. Meskipun sempat mengalami kontraksi akibat pandemi pada tahun 2020, PDB Indonesia kembali meningkat secara stabil sekitar 5% setiap kuartal hingga tahun 2023. Pendapatan nasional bruto (PNB) Indonesia mencapai sekitar USD 4.580, mengembalikan Indonesia ke status negara berpenghasilan menengah atas setelah sebelumnya turun menjadi negara berpenghasilan menengah bawah pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19.



Foto: Presiden RI menerima *handover* Presidensi G20 di KTT Roma. | BPMI Setpres/Laily RE

Sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia bertekad untuk terus memperkuat peran dalam sistem internasional. Dalam Presidensi KTT G20 tahun 2022, misalnya, Indonesia memimpin forum multilateral saat situasi geopolitik sedang hangat, terutama dalam konteks konflik antara Rusia dan Ukraina. Indonesia mengambil pendekatan pasifis dengan menolak saran untuk mengecualikan Rusia dari undangan dan mengundang Ukraina sebagai pengamat, menegaskan bahwa G20 adalah forum untuk ekonomi dan pembangunan, bukan untuk urusan politik. Meskipun demikian, KTT tersebut berhasil mencapai kesepakatan bersama yang diwujudkan dalam Dokumen Deklarasi Pemimpin Bali dan mencakup berbagai isu, mulai dari keamanan energi, perdagangan, kesehatan, hingga transformasi digital.

Sebelumnya pada tahun 2019, pemerintah Indonesia menunjukkan ambisi untuk memiliki signifikansi dalam pembangunan internasional melalui pembentukan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional atau *Indonesian Agency for International Development* (Indonesian Aid). Indonesian Aid menjadi simbol transformasi Indonesia dari penerima bantuan menjadi donatur internasional. Beberapa bantuan yang telah disalurkan meliputi pengiriman 10 juta dosis vaksin polio ke Afghanistan, peralatan kesehatan serta obat-obatan kepada pemerintah Zimbabwe, hingga bantuan kemanusiaan senilai 30 miliar rupiah untuk Gaza dan Sudan. Hingga saat ini, total bantuan yang telah disalurkan Indonesian Aid mencapai 6 triliun Rupiah.

## Hubungan Indonesia dan OECD

Indonesia telah menjalin hubungan dengan OECD selama hampir dua dekade. Pada tahun 2007, Indonesia dipilih sebagai salah satu dari lima negara mitra utama OECD. Sejak saat itu, Indonesia aktif berkolaborasi dengan OECD dalam berbagai inisiatif di bidang ekonomi dan pembangunan.

**2007**

Indonesia menjadi salah satu dari lima Mitra Utama OECD melalui Program Peningkatan Keterlibatan.

**2009**

Indonesia menjadi anggota ke-34 Pusat Pengembangan OECD dan menyetujui "Pernyataan Kerja Sama" dengan Komite Investasi OECD.

**2010**

OECD meluncurkan Survei Ekonomi Indonesia penuh pertama.

**2012**

Indonesia menjadi Mitra Utama pertama yang menandatangani Kerangka Perjanjian Kerja Sama dengan OECD.

**2013**

Indonesia menjadi Mitra Utama pertama yang menandatangani Perjanjian Hak Istimewa dan Imunitas OECD.

**2014**

OECD meluncurkan Program Regional Asia Tenggara, dengan Indonesia sebagai Co-Chair.

**2015**

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Sekretaris Jenderal OECD, Angel Gurría, meresmikan kantor OECD di Jakarta.

**2016**

Presiden Indonesia Joko Widodo dan Sekretaris Jenderal OECD meluncurkan JWP (*Joint Work Program*) OECD-Indonesia kedua untuk periode 2017-2018.

**2017**

Pembaruan Kerangka Perjanjian Kerja Sama selama periode 5 tahun oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Sekretaris Jenderal OECD.

**2017**

Indonesia menandatangani MLI (*Multilateral Instrument*) OECD pada BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) bersama 71 negara pada Pertemuan Dewan Menteri (*Ministerial Council*).

**2018**

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menghadiri MCM (*Ministerial Council Meeting*) OECD pada tahun 2018.

Grafik: Timeline hubungan Indonesia dengan OECD

# Aksesi Indonesia ke OECD



Sumber: ekon.go.id

Pada Juli 2023, pemerintah memulai langkah untuk menjadikan Indonesia anggota OECD sebagai bagian dari ambisi mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah menyampaikan beberapa alasan pentingnya menjadi bagian dari "kelompok negara maju" ini. Pertama, pemerintah memandang bahwa keanggotaan OECD dapat membantu meningkatkan pengelolaan ekonomi dan pembangunan di Indonesia dengan menyesuaikan rencana pembangunan nasional dengan peta jalan aksesi yang ditetapkan oleh OECD. Kedua, pemerintah menilai bahwa keanggotaan OECD dapat membuka akses lebih luas bagi Indonesia ke pasar global serta sumber daya keuangan internasional. Ketiga, dengan menjadi anggota OECD, pemerintah berharap Indonesia dapat keluar dari *middle income* trap dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui investasi asing, transfer teknologi, dan peningkatan sumber daya manusia. Pada intinya, langkah ini bertujuan untuk mendorong Indonesia menuju status negara maju dengan pendapatan per kapita di atas 13.000 dolar AS, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RJPN) 2025-2045.

Proses untuk bergabung (aksesi) dengan OECD biasanya memakan waktu bertahun-tahun. Misalnya, Lithuania baru bisa menjadi anggota setelah menjalani proses selama tiga tahun (2015-2018), yang dinilai sebagai salah satu aksesi yang relatif cepat. Namun, bagi beberapa negara, proses aksesi bisa memakan waktu hingga tujuh tahun. Misalnya Kolombia, yang memulai proses aksesi pada 2013 dan baru diterima pada 2020. Contoh lain, Kosta Rika, yang memulai pada 2015 dan baru diterima pada 2021. Indonesia sendiri berambisi untuk menjadi anggota tetap OECD dalam waktu tiga tahun. Namun, Indonesia mungkin akan menghadapi tantangan yang kompleks dan memerlukan upaya serta sumber daya yang besar untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh OECD.

Hanya 7 bulan, proses pra-aksesi 5 negara  
sebelumnya perlu waktu 5 tahun

Hanya 34 hari



Grafik: Peta jalan aksesi Indonesia ke OECD

## Peluang Indonesia dalam OECD

Dalam hubungan antara empat pilar ambisi Indonesia Emas 2045 dan keanggotaan tetap Indonesia di OECD, pemerintah mengantisipasi bahwa keanggotaan dapat mendorong tercapainya visi tersebut. Pemerintah berpandangan bahwa ada beberapa peluang yang bisa diraih dalam keanggotaan, antara lain :



### Pembangunan sumber daya manusia dan penguasaan iptek

- Akses langsung ke diskusi mengenai pendidikan, kesehatan, teknologi, ilmu pengetahuan, dan ketenagakerjaan.
- Akses informasi, kerja sama, dan pertukaran praktik yang mendukung reformasi kebijakan dalam negeri.



### Pembangunan ekonomi berkelanjutan

- Keanggotaan di OECD sebagai syarat penting untuk meningkatkan daya tarik investasi.
- Standar tinggi OECD dalam perdagangan dan investasi.
- Rekomendasi kebijakan berdasarkan evaluasi ahli dari negara-negara anggota OECD.
- Tinjauan ekonomi berkala dari OECD yang mengkaji tren global dan kebijakan untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.



### **Pemerataan pembangunan:**

- Akses pasar internasional yang lebih luas dan investasi sebagai anggota tetap di OECD.
- Dukungan untuk perluasan kesempatan usaha dan pemerataan pendapatan.
- Upaya untuk pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan akses layanan dasar serta perlindungan sosial.

---

### **Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan**



- Meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan praktik terbaik internasional.
- Penerapan standar tinggi transparansi dan akuntabilitas dari OECD.
- Platform untuk berbagi pengalaman reformasi kebijakan, pencegahan korupsi, dan peningkatan efisiensi pemerintahan.
- Penguatan institusi yang mendukung ketahanan nasional dengan kebijakan yang lebih terukur dan berbasis data.

# Refleksi Singkat Kami: Kekhawatiran dan Tantangan dalam Akses

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, suatu negara harus mematuhi standar dan regulasi OECD untuk dapat bergabung menjadi anggota tetap organisasi tersebut. Standar kepatuhan ini mesti menjadi perhatian Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan tantangan yang mengikutinya mesti diantisipasi dengan seksama untuk memastikan akuntabilitas pemerintah dalam proses akses Indonesia ke OECD.

*Akses Indonesia ke OECD harus mengutamakan kepentingan pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Seringkali rakyat menanggung beban atas implikasi kebijakan ekonomi pembangunan yang asimetris.*

**Untuk dapat tergabung dalam OECD, Indonesia perlu melonggarkan banyak regulasi pasar dan investasi.** Jika tidak dimitigasi dan diatur dengan baik, kerangka ekonomi pasar bebas dan liberalisasi regulasi dapat memperkecil perlindungan bagi usaha lokal dan kesejahteraan buruh/pekerja, memperketat persaingan produk antara pasar domestik dengan pasar internasional, serta meningkatkan potensi kerusakan lingkungan untuk memfasilitasi investasi luar negeri.

**Menjadi anggota OECD artinya Indonesia dianggap sebagai negara yang relatif mampu bersaing dengan negara-negara maju.** "Kemapanan" ini kemungkinan besar akan mempengaruhi aliran donor internasional yang masuk ke Indonesia. Jika Indonesia menjadi anggota OECD, pendanaan untuk berbagai inisiatif non-pemerintah yang selama ini sudah berkurang dikhawatirkan akan semakin sulit, mengingat kebanyakan donor internasional bersumber dari negara-negara anggota OECD. Keberlanjutan dan kontribusi pembangunan oleh OMS perlu diperhatikan.

**Diperlukan tata kelola negara yang akuntabel dan bertanggung jawab untuk mempersiapkan Indonesia menjadi negara maju.** Maka dari itu, peran publik dan OMS untuk memastikan akuntabilitas proses akses Indonesia ke OECD sangat penting. Praktik pengawalan akses dapat dilakukan dengan bersikap analitis dan kritis terhadap kesenjangan antara kebijakan versus kondisi nyata di tengah masyarakat. Selain itu, dapat pula menilai apakah kebijakan saat ini/di masa yang akan datang dapat menjawab tantangan pembangunan yang ada, terlebih adanya daya ungkit standar tata kelola dan kesejahteraan dari OECD yang perlu diikuti Indonesia dalam proses akses.



Foto: Ilustrasi perempuan pedagang kecil beraktivitas di pasar | Hartono Subagio di Unsplash

Sebagai contoh, OMS di Brazil terlibat aktif mengkritisi kesenjangan antara kebijakan versus kondisi nyata perlindungan lingkungan dan HAM sejak Brazil memulai akses ke OECD pada tahun 2017. Contoh lain, di Chili, OMS secara aktif mengadvokasi dan memberi argumentasi penerapan standar praktik lingkungan, bisnis, dan hukum yang lebih ketat di negara tersebut selama periode akses.

Sangat penting bagi OMS dan masyarakat umum untuk menjaga nalar kritis terhadap arah pembangunan nasional. OMS bersama masyarakat patut terlibat aktif mengawal akses Indonesia ke OECD. Termasuk juga memberikan masukan yang konstruktif, memastikan kebijakan publik membawa manfaat yang adil dan menjunjung martabat kemanusiaan bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai slogan OECD, *"better policies for better lives"*.


# Referensi

- About the OECD. (n.d.). OECD. Retrieved June 13, 2024, from <https://www.oecd.org/about/>
- Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri. (2023). Aksesi Indonesia ke OECD: Reviu Strategis Geopolitik, Geoekonomi, dan Implikasinya. Kementerian Luar Negeri RI.
- Economic surveys and country surveillance. (2024). OECD. Retrieved June, 2024, from <https://www.oecd.org/economy/surveys/>
- European Parliament. (2022). Outcome of the 2022 G20 summit in Bali, Indonesia. [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS\\_BRI\(2022\)739263](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)739263)
- Fauzia, M., & Movanita, A. (2021, Maret). OECD Kritik Dominasi BUMN di Pasar RI. Kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2021/03/19/064753426/oecd-kritik-dominasi-bumn-di-pasar-ri?page=all>
- Indonesia Overview: Development news, research, data.* (n.d.). World Bank. Retrieved June 25, 2024, from <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview>
- Indonesia Economy Projected to Remain Resilient.* (2024, June). World Bank. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/06/24/indonesia-economy-projected-to-remain-resilient>
- Jaffrey, S. (2022, November 14). *At the G20, Indonesia Claims Long-Overdue Limelight on the Global Stage.* Carnegie Endowment for International Peace. Retrieved June 25, 2024, from <https://carnegieendowment.org/posts/2022/11/at-the-g20-indonesia-claims-long-overdue-limelight-on-the-global-stage?lang=en>
- Kementerian Keuangan RI. (2022, July 14). *Indonesia dan OECD Menguatkan Kerja Sama untuk Ekonomi yang Lebih Tangguh, Berkelanjutan, dan Inklusif.* Badan Kebijakan Fiskal. Retrieved June, 2024, from <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2022/07/14/4357-indonesia-dan-oecd-menguatkan-kerja-sama-untuk-ekonomi-yang-lebih-tangguh-berkelanjutan-dan-inklusif>
- Kementerian Keuangan RI. (2023, August 10). *Indonesia Berniat Menjadi Anggota OECD, Apa Manfaatnya?* Badan Kebijakan Fiskal. Retrieved June, 2024, from <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2023/08/10/4441-indonesia-berniat-menjadi-anggota-oecd-apa-manfaatnya>
- Kementerian PPN / Bappenas. (2019). *Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045.* Perpustakaan BAPPENAS.
- Key Partner Indonesia.* (2021). OECD. Retrieved June, 2024, from <https://www.oecd.org/southeast-asia/countries/indonesia/>
- OECD. (n.d.). *OECD Legal Instruments.* OECD Legal Instruments. Retrieved June, 2024, from <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments>

# Referensi

- OECD. (n.d.). *OECD member countries and partners*. OECD. Retrieved June, 2024, from [www.oecd.org/about/members-and-partners/](http://www.oecd.org/about/members-and-partners/)
- OECD. (2018). *Active with Indonesia*. OECD.
- OECD. (2021). *OECD 60th anniversary*. OECD. Retrieved June, 2024, from <https://www.oecd.org/60-years/>
- OECD. (2024). *OECD Standards Annual Update 2024*.
- OECD & Government of Indonesia. (2022, July 14). *INDONESIA JOINT WORK PROGRAMME 2022-2025*. OECD.
- OECD Watch. (2022). *Civil society guide to influencing the OECD accession process*. OECD Watch.
- Pemerintah Terus Maksimalkan Proses Aksesi OECD. (2024, May 30). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Retrieved June, 2024, from <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5801/pemerintah-terus-maksimalkan-proses-aksesi-oecd>
- Public Governance*. (2024). OECD. Retrieved June, 2024, from <https://www.oecd.org/governance/>
- Runde, D. F., Askey, T., & McKeown, S. (2020, June 9). *The OECD Faces a Decision Point in 2021*. CSIS. Retrieved June, 2024, from <https://www.csis.org/analysis/oecd-faces-decision-point-2021>
- 75th anniversary of the creation of the OEEC*. (2023). Retrieved June, 2024, from <https://www.oecd.org/about/history/oeec/>
- Targetkan Keanggotaan Penuh OECD dalam 3 Tahun, Menko Airlangga Harapkan Dukungan Lanjutan Seluruh Negara Anggota OECD*. (2024, February 29). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Retrieved June, 2024, from <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5651/targetkan-keanggotaan-penuh-oecd-dalam-3-tahun-menko-airlangga-harapkan-dukungan-lanjutan-seluruh-negara-anggota-oecd>
- United States Department of State. (n.d.). *The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) - United States Department of State*. State Department. Retrieved June, 2024, from <https://www.state.gov/the-organization-for-economic-co-operation-and-development-oecd/>



 Jl. Jati Padang Raya Kav. 3 No. 105, Sunday Market,  
South Jakarta, 12540

 [infid@gmail.com](mailto:infid@gmail.com)

 <https://infid.org/>